

**ANALISIS KESIAPSIAGAAN UPTD PUSAT PENANGGULANGAN  
KRISIS KESEHATAN (P2KK) DINAS KESEHATAN ACEH  
DALAM MENGHADAPI BENCANA GEMPA BUMI**

Irhas Farizi<sup>1</sup>, Nizam Ismail<sup>2</sup>, T. Budi Aulia<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Magister Ilmu Kebencanaan Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh

<sup>2</sup>Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Aceh

<sup>3</sup>Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala

Koresponden : nizamismail@gmail.com<sup>2</sup>

**ABSTRACT**

*The problem in this research is how the preparedness of UPTD staff of Health Crisis Center (P2KK) of Aceh Health Office in facing earthquake disaster. This study aimed to analyze knowledge and attitude, policies and guidance, emergency response plan, and strategy of resource mobility of UPTD P2KK staff of Dinas Kesehatan Aceh in handling earthquake disaster in Aceh. This research uses descriptive research method with quantitative and qualitative approaches. This research uses primary data and secondary data. Population used in this research is all officer UPTD P2KK Dinas Kesehatan Aceh. Samples were taken as many as 54 people in Sampling Population. Data collection was done by documentation study, interview study, and distribution of questionnaires distributed to all field officers UPTD P2KK Dinas Kesehatan Aceh using the formula of percentage. The results will be analyzed univariat to know the level of preparedness of UPTD P2KK staff of Aceh Health Office in the face of earthquake disaster. Based on the result of the research, it can be concluded that the preparedness of UPTD P2KK Dinas Kesehatan Aceh in coping with the earthquake disaster in Aceh is in ready category. Therefore, staff capacity building is still needed such as training and simulation of earthquake preparedness and sustainability and reinforce each other in 7 sub-clusters of health that are currently active so that UPTD P2KK staff of Aceh Health Office are more competent in facing what happened.*

*Keywords: Preparedness, Staff, UPTD P2KK Aceh Health Office*

**ABSTRAK**

Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kesiapsiagaan staf UPTD Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan (P2KK) Dinas Kesehatan Aceh dalam menghadapi bencana gempa bumi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengetahuan dan sikap, kebijakan dan panduan, rencana tanggap darurat, sistem peringatan bencana, dan kemampuan mobilitas sumber daya staf UPTD P2KK Dinas Kesehatan Aceh dalam penanggulangan bencana gempa bumi di Aceh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Populasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah seluruh petugas lapangan UPTD P2KK Dinas Kesehatan Aceh. Sampel penelitian diambil sebanyak 54 orang secara *Population Sampling*. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumentasi, studi wawancara, dan penyebaran kuisioner yang dibagikan kepada seluruh petugas lapangan UPTD P2KK Dinas Kesehatan Aceh dengan menggunakan rumus presentase. Hasil tersebut akan dianalisis secara univariat untuk mengetahui tingkat kesiapsiagaan staf UPTD P2KK Dinas Kesehatan Aceh dalam menghadapi bencana gempa bumi. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dijelaskan kesiapsiagaan UPTD P2KK Dinas Kesehatan Aceh dalam penanggulangan bencana gempa di Aceh sudah dalam kategori siap. Untuk itu, peningkatan kapasitas staf masih sangat diperlukan seperti pelatihan dan simulasi tentang kesiapsiagaan menghadapi gempa bumi secara berkelanjutan, dan memantau serta saling menguatkan koordinasi pada 7 sub klaster kesehatan yang saat ini aktif sehingga staf UPTD P2KK Dinas Kesehatan Aceh lebih kompeten dalam menghadapi yang terjadi.

Kata kunci : Kesiapsiagaan, Staf, UPTD P2KK Dinas Kesehatan Aceh

## PENDAHULUAN

Aceh pernah mengalami bencana besar gempa bumi dan masih berpotensi terjadi bencana yang sama. Potensi ancaman diprediksikan tidak akan berkurang secara signifikan dalam tahun-tahun ke depan. Hal ini disebabkan karena letak geografis, kondisi demografi serta keadaan psikososio kultural masyarakatnya (Lenawida, 2011). Menurut Aritonang (2014) bahwa setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda dalam menghadapi masalah bencana oleh karenanya tidak semua kebijakan yang dikeluarkan secara nasional dapat langsung diterapkan di daerah sehingga Dinas Kesehatan perlu membuat SOP Penanggulangan bencana yang sesuai dengan karakteristik.

Pemerintah sudah mengeluarkan surat Kepmenkes Nomor : 64 tahun 2013 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan yang dikeluarkan sejak tanggal 27 November Tahun 2013 untuk membantu Dinas Kesehatan dalam memenuhi tugasnya untuk kesiapsiagaan bencana. Kebijakan tersebut menguraikan tentang pedoman penanganan bencana bidang kesehatan pada masa pra bencana, bencana, dan pasca bencana mulai situasi bencana tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten. Tugas pokok dan fungsi yang tertera dalam kebijakan tersebut cukup menjelaskan langkah-langkah yang perlu diaplikasikan jika terjadi bencana. Namun kenyataan di lapangan tidaklah seperti yang diamanatkan dalam kebijakan tersebut dan penanggulangannya masih bersifat spontanitas belum dengan perencanaan pra bencana.

Pada studi pendahuluan yang

dilakukan dengan wawancara kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Aceh menunjukkan bahwa sudah ada bagian yang khusus menangani tentang bencana yaitu UPTD Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan (P2KK). SDM yang mengurus bidang ini memang sudah berpengalaman dalam menghadapi bencana dan sudah beberapa memiliki pendidikan kebencanaan. SK penugasan tenaga kesehatan bila terjadi bencana juga sudah dibentuk, namun belum ada garis koordinasi yang baku yang bisa menjadi panduan tenaga kesehatan dan menyatukan hubungan dengan instansi lain yang berhubungan dengan penanggulangan bencana. Sehingga jika bencana terjadi Dinas Kesehatan masih bekerja sendiri-sendiri. Ibaratnya menekan tombol, begitu keadaan bencana terjadi sudah sepatutnya tim kesehatan yang ditetapkan menjadi bagian dari penanggulangan bencana sudah memahami prosedur kerja menempati posnya sendiri. Disamping itu masih ada staf yang belum mendapatkan pelatihan kebencanaan yang disebabkan keterbatasan dana anggaran dalam membuat pelatihan bagi staf sehingga ketika bencana terjadi, staf belum memahami prosedur kerja dan penempatan posnya sendiri. Untuk itu penelitian ini bertujuan menganalisis kesiapsiagaan bidang kesehatan terhadap penanggulangan bencana di Aceh.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Hasil pendataan tingkat kesiapsiagaan staf UPTD P2KK Dinas Kesehatan Aceh akan dianalisis menggunakan analisis univariat untuk mengetahui kesiapsiagaan menghadapi bencana khususnya gempa bumi. Lokasi

penelitian ini dilaksanakan dikantor UPTD P2KK di Dinas Kesehatan Aceh dengan pertimbangan bahwa UPTD tersebut merupakan koordinator bidang kesehatan bila terjadi suatu bencana. Populasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah seluruh petugas lapangan UPTD P2KK Dinas Kesehatan Aceh yang berjumlah 54 orang. Berdasarkan jumlah populasi tersebut, penarikan sampel dalam penelitian ini didasarkan pada metode Population Sampling, maka sampel dalam penelitian ini sebanyak 54 orang.

Untuk mengukur tingkat kesiapsiagaan dalam penelitian ini, digunakan instrumen pembagian kuesioner pada seluruh petugas lapangan dan wawancara mendalam dengan Kepala UPTD P2KK Dinas Kesehatan Aceh. Tingkat kesiapsiagaan akan diindeks dan dikategorikan dengan parameter yang dikemukakan oleh LIPI-UNESCO/ISDR, dan didukung dengan hasil hipotesa serta wawancara mendalam terhadap Kepala UPTD P2KK Dinas Kesehatan Aceh.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik indeks kesiapsiagaan berdasarkan LIPI-UNESCO/ISDR (2006) yang dikategorikan menjadi lima rentang kategori (Tabel 1).

Tabel 1. Tingkat Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Gempa Bumi

No	Nilai	Kategori
1	80 – 100	Sangat siap
2	65 – 79	Siap
3	55 – 64	Hampir siap
4	40 – 54	Kurang siap
5	≤ 40 ( 0 – 39)	Belum siap

Skor maksimum parameter diperoleh dari jumlah pertanyaan dalam parameter yang “diindeks” (masing-masing bernilai satu). Total skor riil parameter diperoleh dengan menjumlahkan skor riil seluruh pertanyaan dalam parameter yang bersangkutan. Indeks berada pada kisaran nilai 0 – 100, sehingga semakin tinggi nilai indeks maka semakin tinggi pula tingkat kesiapsiagaannya. Setelah dihitung indeks parameter atau responden kemudian dapat ditentukan nilai indeks keseluruhan sampel. Jika sampel dalam penelitian ini berjumlah 54 orang, maka indeks keseluruhan sampel dapat dihitung dengan menjumlahkan indeks seluruh sampel dengan 54 sampel. Penentuan nilai indeks untuk setiap parameter dihitung berdasarkan rumus :

$$\text{Indeks} = \frac{\text{Total skor riil parameter}}{\text{Skor maksimum parameter}} \times 100$$

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengaruh Pengetahuan dan Sikap Staf UPTD P2KK Dinas Kesehatan Aceh Dalam Menghadapi Bencana Gempa Bumi Di Aceh

Pengetahuan merupakan faktor utama kunci kesiapsiagaan. Pengalaman bencana gempa bumi di Aceh, Nias dan Yogyakarta serta berbagai bencana yang terjadi diberbagai daerah lainnya memberikan pelajaran yang sangat berarti akan pentingnya pengetahuan mengenai bencana alam. Pengetahuan dapat mempengaruhi sikap dan kepedulian masyarakat untuk siaga dalam menghadapi bencana, terutama bagi mereka yang bertempat tinggal di daerah pesisir yang rentan terhadap bencana alam (LIPI-UNESCO/ISDR, 2006).

Menurut LIPI-UNESCO/ISDR (2006) dan Citizen Corps (2006) bahwa pengetahuan dan sikap dapat mempengaruhi kesiapsiagaan untuk mengantisipasi bencana. Berdasarkan analisis hasil penelitian dapat diketahui bahwa pengetahuan dan sikap staf UPTD P2KK Dinas Kesehatan Aceh dalam menghadapi bencana gempa bumi di Aceh berada pada indeks 73 atau kategori siap. Ini sesuai dengan IDEP (2007) bahwa semakin mengenali dan memahami fenomena berbahaya itu dengan baik, semakin dapat pula menyikapinya dengan baik. Sikap dan tanggap yang didasarkan atas pengenalan dan pemahaman yang baik dapat memperkecil risiko bencana yang mengena pada individu. Bencana gempa bumi bisa terjadi kapan saja sepanjang tahun, siang atau malam, dengan dampak buruk yang terjadi secara mendadak dan hanya memberikan sedikit isyarat bahaya bencana gempa bumi sehingga sangat diperlukan pengetahuan staf yang memadai tentang bencana gempa bumi.

Hasil analisis menggunakan uji pearson chi square didapatkan nilai  $P \text{ value} = 0,025 < \alpha = 0,05$  yang menunjukkan ada pengaruh yang signifikan antara pengetahuan dan sikap terhadap kesiapsiagaan UPTD P2KK Dinas Kesehatan Aceh dalam menghadapi bencana gempa bumi di Aceh. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan sikap merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan kesiapsiagaan UPTD P2KK Dinas Kesehatan Aceh dalam menghadapi bencana gempa bumi di Aceh. Ini sejalan dengan LIPI-UNESCO/ISDR (2006) bahwa individu yang mempunyai pengetahuan lebih tinggi, diharapkan lebih siap

menghadapi kemungkinan terjadinya bencana, sebab pengetahuan merupakan dasar dari kesadaran untuk melakukan perencanaan kedaruratan, mobilisasi sumber daya dan peringatan dini.

Ini didukung hasil wawancara mendalam yang dilakukan oleh peneliti bahwa hampir seluruh staf UPTD P2KK sudah kompeten bila terjadi bencana apapun. Yang artinya tingkat pengetahuan dan sikap staf UPTD P2KK sudah siap dan ini berpengaruh terhadap kesiapsiagaan UPTD P2KK dalam menghadapi bencana. Menurut Notoatmojo (2010) bahwa makin tinggi pendidikan individu, makin mudah individu tersebut menerima informasi, baik dari orang lain, maupun dari media massa. Harapannya individu dengan pendidikan tinggi makin luas pengetahuannya tentang bencana gempa bumi, namun bukan berarti bahwa individu dengan pendidikan rendah memiliki pengetahuan yang rendah pula, akan tetapi peningkatan pengetahuan tidak mutlak diperoleh dari pendidikan formal, tetapi juga dapat diperoleh dari pendidikan non formal. Sehingga semakin baik pengetahuan tentang bencana, semakin baik pula kesiapsiagaan terhadap bencana yang dihadapi.

## **2. Pengaruh Kebijakan dan Panduan Staf UPTD P2KK Dinas Kesehatan Aceh Dalam Menghadapi Bencana Gempa Bumi Di Aceh**

Kebijakan dan panduan merupakan pilar utama dalam mengambil sikap, sehingga keberhasilan suatu program itu tergantung pada hal tersebut. Berdasarkan analisis hasil penelitian dapat diketahui bahwa kebijakan dan panduan staf UPTD P2KK Dinas Kesehatan Aceh dalam menghadapi bencana gempa bumi di Aceh

berada pada indek 96 atau kategori sangat siap. Ini selaras dengan Depkes RI (2006) bahwa kesiapsiagaan suatu instansi kesehatan untuk mengantisipasi bencana gempa bumi tercermin dari adanya kebijakan, peraturan dan panduan yang dikeluarkan oleh instansi kesehatan tersebut. Kebijakan, peraturan dan panduan adalah bentuk komitmen sangat penting, dan merupakan langkah awal yang memayungi semua program dan kegiatan kesiapsiagaan terhadap bencana.

Dari hasil analisis menggunakan uji pearson chi square diperoleh nilai  $P \text{ value} = 0,013 < \alpha = 0,05$ , menunjukkan ada pengaruh yang signifikan antara kebijakan dan panduan terhadap kesiapsiagaan UPTD P2KK Dinas Kesehatan Aceh dalam menghadapi bencana gempa bumi di Aceh. Ini menunjukkan kebijakan dan panduan sangat penting dalam penanggulangan bencana, terutama bagi UPTD P2KK. Ini sejalan dengan LIPI-UNESCO/ISDR (2006) kebijakan kesiapsiagaan bencana alam sangat penting dan merupakan upaya konkrit untuk melaksanakan kegiatan siaga bencana. Kebijakan yang signifikan berpengaruh terhadap kesiapsiagaan meliputi; pendidikan publik, emergency planning, sistem peringatan bencana dan mobilisasi sumber daya, termasuk pendanaan, organisasi pengelola, Sumber Daya Manusia (SDM) dan fasilitas-fasilitas penting untuk kondisi darurat bencana. Kebijakan-kebijakan dituangkan dalam berbagai bentuk, tetapi akan lebih bermakna apabila dicantumkan secara konkrit dalam peraturan-peraturan, seperti : Surat Keputusan (SK) atau Peraturan Daerah (Perda) yang disertai dengan job description yang jelas. Agar kebijakan dapat

diimplementasikan dengan optimal, maka dibutuhkan panduan operasionalnya.

Ini didukung hasil wawancara mendalam didapatkan informasi bahwa UPTD P2KK ketika pada saat terjadi bencana berdasarkan kebijakan pimpinan di instansi tersebut langsung mengaktifkan 7 sub klaster kesehatan yang ada saat ini diantaranya pelayanan kesehatan, pengendalian penyakit dan lingkungan serta penyiapan air bersih dan sanitasi yang berkualitas, pelayanan kesehatan gizi, pengelolaan obat bencana, penyiapan kesehatan reproduksi dalam situasi bencana, penatalaksanaan korban mati (DVI), pengelolaan informasi dibidang kesehatan. Selain itu UPTD P2KK sendiri dengan kebijakannya sudah menerbitkan 40 SOP untuk pelayanan ambulance terpadu dan 4 SOP yang khusus untuk bencana yaitu ada TRC, RAH, ada assessment untuk money dan ada untuk SOP TRC atau tim reaksi cepat.

### **3. Pengaruh Rencana Tanggap Darurat Staf UPTD P2KK Dinas Kesehatan Aceh Dalam Menghadapi Bencana Gempa Bumi Di Aceh**

Dalam rencana tanggap darurat salah satu hal yang penting dilakukan untuk menghadapi bencana adalah koordinasi yang berkesinambungan serta memprediksi kebutuhan sarana yang tepat saat terjadi bencana agar tidak mengalami kekurangan dalam mengatasi bencana yang akan datang. Berdasarkan analisis hasil penelitian dapat diketahui bahwa rencana tanggap darurat staf UPTD P2KK Dinas Kesehatan Aceh dalam menghadapi bencana gempa bumi di Aceh berada pada indek 86 atau kategori sangat siap. Ini sejalan dengan LIPI-

UNESCO/ISDR (2006) rencana ini menjadi bagian yang penting dalam kesiapsiagaan, terutama berkaitan dengan evakuasi, pertolongan dan penyelamatan, agar korban bencana dapat diminimalkan. Upaya ini sangat krusial, terutama pada saat terjadi bencana dan hari - hari pertama setelah bencana sebelum bantuan dari pemerintah dan pihak luar datang. Dari pengalaman bencana di Aceh dan berbagai pengalaman bencana lainnya di Indonesia, menggambarkan bahwa bantuan dari luar tidak dapat segera datang, karena rusaknya sarana infrastruktur, seperti jalan, jembatan dan pelabuhan sehingga perencanaan tanggap darurat sangat penting untuk dilakukan.

Hasil uji statistik diperoleh nilai P Value=  $0,000 < \alpha = 0,05$ , menunjukkan ada pengaruh yang signifikan antara rencana tanggap darurat terhadap kesiapsiagaan UPTD P2KK Dinas Kesehatan Aceh dalam menghadapi bencana gempa bumi di Aceh. Ini sesuai dengan Depkes RI (2006) bahwa bencana gempa bumi menjadi kurang bermakna apabila tidak diikuti dengan tindakan konkrit untuk mengantisipasinya seperti melakukan perencanaan penyelamatan korban, tempat evakuasi, melakukan pertolongan pertama dan sebagainya sesuai dengan tugas dan fungsinya di rumah sakit. Perencanaan kedaruratan merupakan bagian penting dari aktivitas yang perlu dilakukan dalam kesiapsiagaan mengantisipasi gempa bumi.

Ini didukung pula dari informasi yang peneliti dapatkan dari wawancara mendalam bahwa dalam rencana tanggap darurat ketika bencana terjadi, hal pertama yang dilakukan adalah koordinasi dengan berbagai lintas sektor dan lintas program

yang terkait. Kemudian UPTD P2KK melakukan tindakan assesment dibidang kesehatan dengan mengaktifkan sub - sub klaster kesehatan yang ada. Karena koordinasi merupakan yang paling utama dilakukan dalam rencana tanggap darurat. Ini sesuai dengan LIPI-UNESCO/ISDR (2006) dalam hal rencana tanggap darurat sangat diperlukan organisasi pengelola bencana, termasuk kesiapsiagaan bencana, rencana evakuasi, termasuk lokasi dan tempat evakuasi, peta, jalur dan rambu-rambu evakuasi, posko bencana dan prosedur tetap (protap) pelaksanaan rencana pertolongan pertama, penyelamatan, keselamatan dan keamanan ketika terjadi bencana, rencana pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk makanan dan minuman, pakaian tempat/tenda pengungsian, air bersih dan sanitasi lingkungan, kesehatan dan informasi tentang bencana dan korban, peralatan dan perlengkapan evakuasi, fasilitas-fasilitas penting untuk keadaan darurat.

#### **4. Pengaruh Sistem Peringatan Bencana Staf UPTD P2KK Dinas Kesehatan Aceh Dalam Menghadapi Bencana Gempa Bumi Di Aceh**

Dalam hal kesiapsiagaan menghadapi bencana gempa bumi dapat terlihat dari akses mendapatkan informasi, fasilitas peralatan untuk menyebarkan informasi yang perlu terkait gempa bumi baik secara kesepakatan lokal maupun dengan menggunakan informasi teknologi. Berdasarkan analisis hasil penelitian dapat diketahui bahwa sistem peringatan bencana staf UPTD P2KK Dinas Kesehatan Aceh dalam menghadapi bencana gempa bumi di Aceh berada pada indek 83 atau kategori sangat siap. Ini sesuai dengan LIPI-

UNESCO/ISDR (2006) bahwa sistem peringatan (Warning System) merupakan bagian penting dari kesiapsiagaan dalam menghadapi gempa bumi. Tanda yang diberikan dari sistem peringatan akan disampaikan kepada baik langsung maupun tidak langsung, kemudian dapat merespon peringatan tersebut. Sejalan dengan IFRC (2000), bahwa sistem peringatan yang efektif sangat bermanfaat untuk menghindarkan diri dari bahaya yang mungkin terjadi. Sistem peringatan dini merupakan faktor kunci dari kesiapsiagaan yang menghubungkan antara tahap kesiapsiagaan dan tanggap darurat. Secara teoritis bila peringatan dini disampaikan tepat waktu, maka bencana dahsyat dapat diperkecil dampak negatifnya. Ketika mengembangkan sistem peringatan dini bencana gempa bumi pengambil kebijakan harus memperhitungkan persepsi individu terhadap peringatan, pengalaman masa lalu terkait gempa bumi, keyakinan dan sikap mengenai bencana.

Hasil uji statistik diperoleh nilai P Value= 0,414 >  $\alpha$ = 0,05, menunjukkan tidak ada pengaruh yang signifikan antara sistem peringatan bencana terhadap kesiapsiagaan UPTD P2KK Dinas Kesehatan Aceh dalam menghadapi bencana gempa bumi di Aceh. Berdasarkan hasil uji statistik diatas menurut asumsi peneliti sistem peringatan bencana gempa bumi di UPTD P2KK belum tersedia sirine atau lainnya sebagai sistem peringatan bencana. Itu terlihat dari 54 responden, sebanyak 23 responden atau kurang dari setengah menjawab kalau khususnya UPTD P2KK belum menyiapkan sirine atau lainnya sebagai sistem peringatan bencana, disamping itu masih menganggap bahwa bencana bukan

hal rutinitas, tapi hanya insidental. Fenomena ini menggambarkan masih kurangnya perhatian UPTD P2KK Dinas Kesehatan Aceh terhadap sistem peringatan bencana berbasis teknologi yang bersumber dari pemerintah atau berbasis kearifan lokal sehingga masih diperlukan sosialisasi, latihan dan simulasi secara periodik kepada staf.

Selain itu informasi yang peneliti dapatkan dari wawancara mendalam bahwa dalam sistem peringatan bencana, UPTD P2KK Dinas Kesehatan Aceh tidak dapat menyediakan sirine atau lainnya sebagai sistem peringatan bencana dikarenakan belum ada aturan yang membolehkan dan tidak ingin adanya tumpang tindih dengan instansi lain seperti Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA).

#### **5. Pengaruh Mobilisasi Sumber Daya Staf UPTD P2KK Dinas Kesehatan Aceh Dalam Menghadapi Bencana Gempa Bumi Di Aceh**

Berdasarkan analisis hasil penelitian dapat diketahui bahwa mobilisasi sumber daya staf UPTD P2KK Dinas Kesehatan Aceh dalam menghadapi bencana gempa bumi di Aceh berada pada indek 70 atau kategori siap. Ini selaras dengan LIPI-UNESCO/ISDR (2006) bahwa sumber daya yang tersedia, baik sumber daya manusia maupun pendanaan dan sarana/prasarana penting untuk keadaan darurat dan merupakan potensi yang dapat mendukung atau sebaliknya menjadi kendala dalam kesiapsiagaan bencana alam. Karena itu, mobilisasi sumber daya menjadi faktor yang krusial. Mobilisasi sumber daya staf meliputi adanya staf yang terlibat dalam pertemuan/seminar, pelatihan kesiapsiagaan

bencana, adanya keterampilan yang berkaitan dengan kesiapsiagaan, adanya alokasi dana atau untuk menghadapi bencana, serta adanya kesepakatan untuk memantau peralatan dan perlengkapan siaga bencana secara regular

Hasil uji statistik diperoleh nilai P Value= 0,000 <  $\alpha$ = 0,05, menunjukkan ada pengaruh yang signifikan antara mobilisasi sumber daya terhadap kesiapsiagaan UPTD P2KK Dinas Kesehatan Aceh dalam menghadapi bencana gempa bumi di Aceh. Ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ablah (2008) terhadap petugas medis di Kota New York, peserta pelatihan mengemukakan bahwa mereka memiliki lebih banyak pengalaman dengan diadakan pelatihan kesiapsiagaan kedaruratan bencana daripada rekan - rekan mereka yang tidak mengikuti pelatihan, mereka mengakui secara khusus memiliki persiapan dalam merespons bencana serta diberikan peran yang dapat diandalkan ketika bencana, juga kompetensi lainnya yang sangat dibutuhkan oleh setiap petugas penanggulangan bencana.

Ini diperkuat dengan informasi yang peneliti dapatkan dari wawancara mendalam bahwa hampir seluruh staf UPTD P2KK kompeten bila dilibatkan dalam jenis bencana apapun. Berdasarkan wawancara tersebut bahwa sebagian besar staf UPTD P2KK udah banyak mengikuti pelatihan dan berpengalaman di bidangnya masing - masing.

## KESIMPULAN

Hasil kajian menunjukkan bahwa tingkat kesiapsiagaan UPTD P2KK Dinas Kesehatan Aceh berada pada indek 79 dengan kategori siap, ini berarti UPTD

P2KK Dinas Kesehatan Aceh belum sepenuhnya sangat siap siaga menghadapi bencana gempa bumi, begitu juga dengan UPTD P2KK Dinas Kesehatan Aceh masih terkonsentrasi pada pemenuhan kebutuhan fasilitas peralatan penunjang kesehatan dilapangan dan peningkatan kapasitas petugas atau staf dilapangan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar - besarnya kepada Bapak Kepala Dinas Kesehatan Aceh dr. Hanif dan Ibu Kepala UPTD P2KK Dinas Kesehatan Aceh dr. Hasnani, M.Kes beserta jajarannya yang telah membantu dalam memberikan izin serta data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ablah, E., Annie, M, T., Leslie, H., Chris, W., Kristine, M., Gebbie. 2008. "Community Health Centers and Emergency Preparedness: An Assessment of Competencies and Training Needs. *Jurnal Community Health*, 33:241-247.
- Aritonang, M. 2014. *Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan Pada Erupsi Gunung Sinabung*. Tesis, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Citizen Corps, 2006. *Citizen Corps Personal Behavior Change Model for Disaster Preparedness. Citizen Preparedness Review. Community Resilience through Civil Responsibility and Self-Reliance*. Department of Homeland Security FEMA, Washington.
- Depkes RI. 2006. *Buku Pedoman Manajemen Sumber Daya dan Kesehatan Dalam Penanggulangan Bencana*. Depkes RI, Jakarta.

- IDEP. 2007. *Gempa Bumi*. Yayasan IDEP, Bali.
- IFRC. 2000. *Introduction to Disaster Preparedness*. Disaster Preparedness training Program, USA.
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 064 Tahun 2013 tentang *Penanggulangan Krisis Kesehatan*. Kemenkes RI, Jakarta.
- Lenawida, 2011. *Pengaruh Pengetahuan, Sikap dan Dukungan Keluarga terhadap Kesiapsiagaan Masyarakat Menghadapi Bencana Gempa Bumi*. Tesis, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- LIPI-UNESCO/ISDR. 2006. *Kajian Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Mengantisipasi Bencana Gempa dan Tsunami*, Deputi Ilmu Pengetahuan Kebumihan. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta.
- Notoatmodjo, S. 2010. *Metodelogi Penelitian Kesehatan, edisi revisi*, Rineka Cipta, Jakarta.